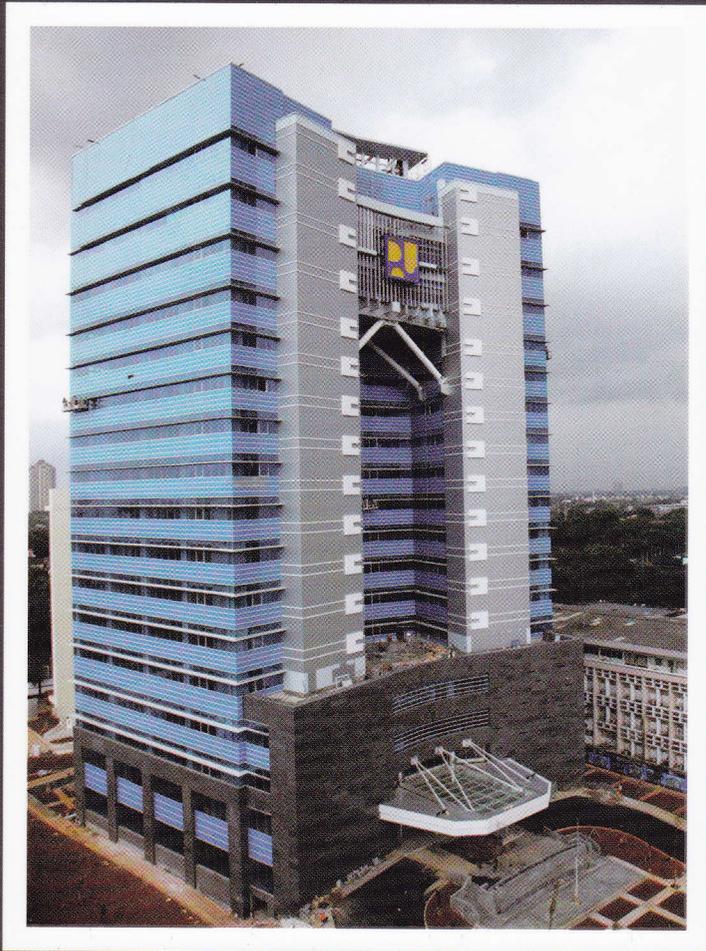


JURNAL

PUSKASTRA

PUSAT KAJIAN STRATEGIS

VOLUME I NOMOR 1
JULI—DESEMBER 2012



Pola Investasi Infrastruktur Bidang PU
di Wilayah Timur Indonesia

Pembangunan Kawasan Perbatasan
Pulau Kalimantan

Kebijakan Peningkatan Penanganan Akses
Jalan Pelabuhan dalam Rangka Menunjang
Kelancaran Arus Barang dan Jasa

MEMBANGUN WILAYAH DAN KAWASAN KHUSUS



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ISSN: 2301-9239

PEMBINA

Sekretaris Jenderal Kementerian PU
Ir. Agoes Widjanarko, MIP
Staf Ahli Menteri PU Bidang Ekonomi dan Investasi
Ir. Setia Budhy Algamar, MURP
Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan
Ir. Ismanto, M.Sc
Staf Ahli Menteri PU Bidang Pengembangan Keahlian
dan Tenaga Fungsional
Ir. Purnarachman Hadipoerwono, CES

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian PU
Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, M.Si

DEWAN REDAKSI

Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian PU
Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, M.Si
Kepala Bagian Tata Usaha Puskastra
Dra. Siti Afrida, M.M.
Kepala Bidang Pengembangan Investasi Puskastra
Ir. Riono Suprpto, S.E., M.T.
Kepala Bidang Strategi Pembangunan Puskastra
Ir. Wartantio Pribadi, M.Eng. Sc
Kepala Bidang Kajian Kinerja
Ir. Kemas Moh. N. Asikin, M.T.

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI

Dra. Siti Afrida, M.M.

WAKIL PEMIMPIN UMUM/REDAKSI

Sri Widayati, S.Sos, M.M.

REDAKTUR PELAKSANA

Ace Hermawan, S.H., M.Si
Ir. M. Atang, M.Si
Entatarina Simanjuntak, S.T., M.Plan
Setyo Purnomo, S.E.

SEKRÉTARIS REDAKSI

Setyo Purnomo, S.E.

REDAKTUR

Tommy Aramanda, S.T.
Iman Argiono, S.Kom
Maryam Jamielaa, S.Kom

REPORTER

Luhur Selo Baskoro, S.E.
Ari Purwani, S.T., S.Com
Indra Sulistyio, S.E., M.EC.Dev
Neneng Chairiah, S.Sos

FOTOGRAFER/RISET FOTO

Reza Tiar Kusumo, S.Kom
Rio Sapta Pradikta
Muhammad Shidiq Pamungkas

DISTRIBUSI/SIRKULASI

Umar
Coltrina
Laila

KONTRIBUTOR

Jamaludin (Sulawesi)
Noviza (Sumatera)
Shakti (Jawa)
Mario (Kalimantan)
Anwar (Papua)

SUPERVISOR BAHASA/PERWAJAHAN

Solichin M. Awi

DESAIN/TATA LETAK

Ferry Ardianto

Jurnal PUSKA STRA diterbitkan oleh:
PUSAT KAJIAN STRATEGIS (PUSKA STRA)
SEKRÉTARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
ISSN: 2301-9239

Alamat Redaksi

PUSKA STRA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kampus PU Lantai 4
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta – 12110
Telp. : 021 - 727 8807
Fax. : 021 - 727 97320
E-mail : puskastra@pu.go.id

ABSTRAK

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan
Pemerataan Kesejahteraan

3



FOKUS

Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus dalam Kerangka
Kebijakan Pengembangan
Kawasan Strategis Nasional

5



KAJIAN

Pola Investasi Infrastruktur
Bidang PU di Wilayah Timur
Indonesia

13



Pembangunan Kawasan
Perbatasan Pulau Kalimantan

21



Kebijakan Peningkatan Penanganan
Akses Jalan Pelabuhan dalam
Rangka Menunjang Kelancaran
Arus Barang dan Jasa

33

SUDUT PANDANG

PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Arah Kebijakan Menuju Kebijakan yang Terarah

48

Strategi Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Papua Barat

52

JENDELA DUNIA

Koridor Pembangunan Malaysia
(Studi Kasus: Koridor Ekonomi Iskandar Malaysia)

59

VISI & INSPIRASI | DR. Ir. MOCHAMMAD AMRON, M.Sc

62

OPINI

Motivasi terhadap Pekerjaan dan Karier
dalam Bingkai Reformasi Birokrasi

69

TENTANG PUSKA STRA

74

WARTA PUSKA STRA

77

GALERI PUSKA STRA

82

FOTO SAMPUL

Bangunan Hijau Kampus Kementerian Pekerjaan Umum: Gedung yang didesain berkonsep *green* ini mendapatkan pengakuan Platinum (sertifikat tertinggi) dari *Green Building Council Indonesia* (GBCI) sebagai Bangunan Hijau. Diresmikan pemakaiannya oleh Menteri PU Djoko Kirmanto pada 1 Juni 2012, gedung baru itu merupakan salah satu bukti nyata komitmen Kementerian PU mengurangi emisi CO₂ demi menjaga ekologi melalui penghematan pemakaian energi yang berdampak pada efisiensi biaya operasional. Bangunan Hijau Kampus Kementerian PU ini mampu mengurangi kebutuhan terhadap infrastruktur lain seperti listrik, air, lahan, material, dan limbah konstruksi sehingga berperan dalam pengurangan dampak kerusakan lingkungan, baik pada level lokal maupun global. FOTO: PUSKOM KEMENTERIAN PU

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Arah Kebijakan Menuju Kebijakan yang Terarah

Dr. BAMBANG ISTIJONO, ME

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP - Dosen Universitas Andalas



Pada 29 Mei 2012 di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dilangsungkan Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur bertema 'Membangun Kawasan Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat'. Rapat ini menghasilkan 12 poin rumusan yang, pada prinsipnya, juga merupakan rekomendasi untuk pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan dalam arti luas dan menyeluruh.

Sebagaimana dipaparkan *JURNAL PUSKASTRA* edisi ini dalam kajian *Pembangunan Kawasan Perbatasan Pulau Kalimantan*, fokus pembangunan wilayah maupun kawasan perbatasan seharusnya mencakup keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM)-nya. Maka, pembangunan infrastruktur juga diharapkan diikuti pembangunan manusia menuju terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan tersebut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, pengelolaan perbatasan mengandung dua dimensi berbeda,

namun tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaannya, yaitu **batas wilayah negara** (*border*) dan **kawasan perbatasan** (*frontier*).

Pengelolaan perbatasan bernilai sangat strategis dan penting mengingat terkait langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara, penegakan pertahanan dan keamanan negara, pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan, serta tanggung jawab bersama dalam membangun daya saing warga masyarakat perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga. Maka, dalam pengelolaan perbatasan tidak bisa mengandalkan hanya pendekatan keamanan (*security approach*), tetapi harus juga dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*).

Sebanyak 12 poin rumusan yang dihasilkan Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur memang bersifat spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik serta tuntutan kawasan perbatasan di provinsi tersebut. Namun, beberapa poin sejalan serta bisa dijadikan acuan kebijakan provinsi-provinsi lain dalam mengelola kawasan perbatasannya.

Di antaranya, percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan segmen batas negara yang masih bermasalah (*Outstanding Boundary Problem/OBP*); peningkatan upaya pengamanan batas negara yang didukung sarana-prasarana pertahanan keamanan yang memadai, peningkatan upaya penindakan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran batas negara dan kegiatan ilegal di perbatasan; pembenahan manajemen atau pengelolaan *exit-entry point* yang telah disepakati pada *Border Crossing Agreement* menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan pelayanan *customs, immigration, quarantine, dan security* (CIQS) secara terpadu/satu atap yang didukung sarana memadai guna menghambat pelanggaran lintas batas.

Rumusan tersebut menjawab lima kondisi serta permasalahan umum di perbatasan, yaitu: (1) kondisi masyarakatnya yang masih terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal meskipun potensi sumber daya cukup besar; (2) kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah; (3) terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara RI ke Malaysia dan sebaliknya; (4) terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat

di wilayah perbatasan negara Malaysia yang dapat menimbulkan kecemburuan; serta (5) beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan belum tuntas.

Grand Design, Rencana Induk, dan Rencana Aksi

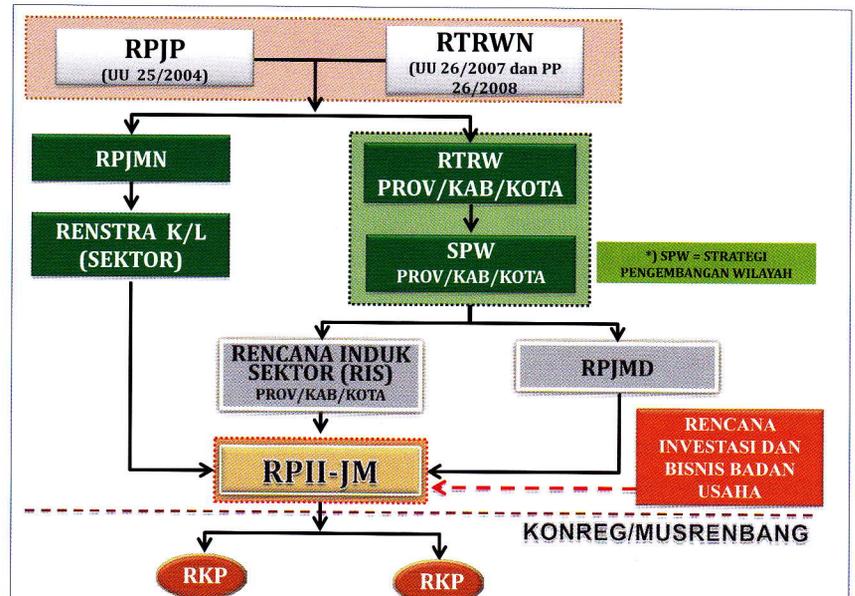
Mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan memang bukan tugas yang ringan dan mudah. Namun, demi NKRI dan warga negaranya, mau tidak mau tugas mulia membela dan cinta negara harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai tanggung jawab menjalankan amanat konstitusi.

Yang dibutuhkan adalah arah kebijakan serta berbagai pendekatan dalam kebijakan mengelola perbatasan yang lebih terarah, terintegrasi, dan terukur. Terkait arah kebijakan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, telah diterbitkan UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang BNPP, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP.

Agar pengelolaan perbatasan lebih terarah, terintegrasi, dan terukur, pemerintah c.q. BNPP telah menerbitkan beberapa produk kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan, yaitu *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011–2025 dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011–2014.

Grand Design dan Rencana Induk berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan

SINERGI & SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH



Sumber: Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, 'Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur', dalam Rapat Koordinasi di Balikpapan, 29 Mei 2012.

atau rencana aksi dan pelaksanaan pembangunan perbatasan, baik oleh pemerintah pusat (kementerian/LPNK terkait), pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan sebagai lokasi prioritas [Lokpri]), dunia usaha, dan masyarakat secara terpadu.

Bisa dikatakan, *Grand Design* dan Rencana Induk merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) rencana pembangunan perbatasan dalam kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan, dan penanggung jawab pelaksanaannya.

Sesuai UU No.43 Tahun 2008 Pasal 15 dan Perpres No. 12 Tahun 2010 Pasal 3, BNPP bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Berdasarkan landasan-landasan hukum tersebut, dalam pengelolaan perbatasan BNPP pun

berperan sebagai regulator, koordinator, akselerator, dan dinamisator.

Untuk menjalankan peran-peran tersebut, diberlakukan tahapan pengembangan kelembagaan pengelola perbatasan selama lima tahun pertama (2010–2014). Kelima tahapan tersebut adalah inisiasi (2010), instalasi (2011), konsolidasi (2012), stabilisasi (2013), dan akselerasi (2014).

Pada kurun 2011–2014 ditetapkan lima agenda utama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yaitu penetapan dan penegasan batas wilayah negara; peningkatan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum; pengembangan ekonomi kawasan; pemenuhan kebutuhan sosial dasar; dan penguatan kelembagaan.

Dalam pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta, 31 Mei 2012, membahas 'Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia', Sekretaris BNPP memaparkan, saat ini terdapat 12 pulau kecil terluar yang memerlukan perhatian

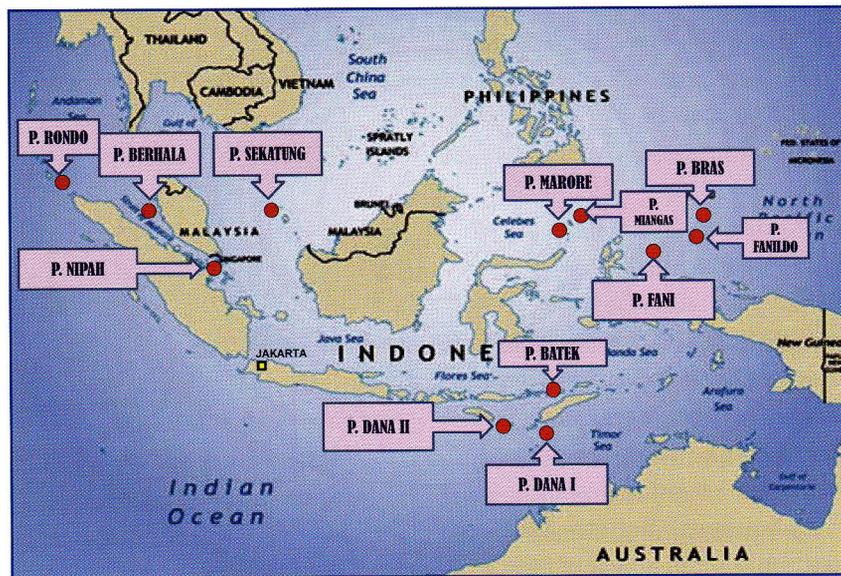
khusus (*lihat peta*).

Sedangkan menyangkut proses penyelesaian batas wilayah negara, saat ini sedang dilakukan *standard operating procedure* (SOP) penyelesaian 5 (lima) segmen (OBP) di sektor timur melalui Kelompok Kerja Bersama atau *Joint Working Group* (JWG), yaitu: Segmen Pulau Sebatik, Segmen Sungai Sinapat, Segmen Sungai Simantipal, Segmen B 2700—B 3100, dan Segmen C 500—C 600.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, untuk periode 2011—2014 wilayah penanganan difokuskan pada 12 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan 111 kecamatan sebagai Lokpri.

Lokpri terbagi dalam tiga kelompok: Lokpri I, Lokpri II, dan Lokpri III untuk di darat dan laut dengan kriteria: (1) kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau terdapat *exit/entry point* (di darat); (2) kecamatan yang secara tradisional memiliki interaksi intensif dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi dengan penduduk negara tetangga di sebelahnya (ditandai adanya *exit/entry point* melalui laut yang disepakati dengan negara tetangga); (3) kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (4) kecamatan yang memiliki pulau-pulau kecil terluar (PPKT); dan (5) pertimbangan khusus.

12 PULAU KECIL TERLUAR YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS



Sumber: BNPP

Berbagai kegiatan strategis telah dilakukan BNPP terkait pengelolaan wilayah perbatasan pada 2011 dan akan dilanjutkan tahun ini serta tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun 2012, sesuai Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012, telah dialokasikan anggaran Rp 3.858.379.590.000. Alokasi anggaran diklasifikasikan berdasarkan Kementerian/Lembaga dan Provinsi. Juga kegiatan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (GERBANG DUTAS) Tahun 2012.

Dari keseluruhan paparan dalam artikel ini, bisa disimpulkan bahwa pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang selama ini masih berjalan secara parsial, bisa

diintegrasikan penanganannya secara komprehensif, integral, dan terukur oleh BNPP.

Sekretariat BNPP dapat berfungsi sebagai *clearing house* dalam memverifikasi, memfasilitasi, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja serta anggaran pembangunan perbatasan oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Grand Design, Rencana Induk, dan Rencana Aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan menjadi acuan BNPP, Kementerian/Lembaga Terkait, dan BPP di daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. ■

KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PU DI KAWASAN PERBATASAN (RENSTRA PU 2010—2014)

BIDANG	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	DANA
Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku, Pembangunan Jaringan Irigasi, Pengaman Pantai Pulau Laut, O&P Waduk, Pengendali Banjir, Rehab Embung, Peningk. Jar. Rawa	NAD, Kepri, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulut, Malut, Maluku, Papua Barat		Rp 828 M
Bina Marga	Pembangunan Jalan: <ul style="list-style-type: none"> Tj Harapan-Galing-Sp. Tanjung-Aruk-Bts. Sarawak, Kembayan-B.Karangan-Entikong-Bts. Sarawak, Sambas-Tnh Hitam Sp. Tiga Apas-Simanggaris-Serudong Jayapura-Hamadi-PNG Merauke-Erambu Kefamenanu-Oelfaub Atambua-Motoain 	Kalbar Kalbar Kaltim Papua Papua NTT NTT	59,6 km 87,7 km 92,8 km 53 km 150 km 21,3 km 30,5 km	Rp 770 M Rp 1.363 M Rp 403 M Rp 16 M Rp 151 M Rp 61 M Rp 78 M

BIDANG	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	DANA
Cipta Karya	Penyediaan Air Minum, Sanitasi, Permukiman	Riau Kepulauan Kalbar, Kaltim, Sultra, NTT, Malut	83 kws (air minum), 40 (permukiman)	Rp 438 M
Penataan Ruang	Penyusunan RTR daerah di kawasan perbatasan	NAD, Sumut, Riau, Kepri, Sulut, NTT, Maluku, Malut Papua Barat, Papua	9 KSN Prbtsn 75 kota/kab di perbatasan	
			Total dana fisik	Rp 4.180 M

ALOKASI DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN UNTUK BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012

No	PER PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Jutaan)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	379.743,02
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.259.372,04
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	324.813,63
TOTAL		1.963.928,69

REKAPITULASI PER PROGRAM PEMBANGUNAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012

No	PROVINSI	ANGGARAN (Dalam Jutaan)
1	PROVINSI ACEH	6.876,50
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.539,56
3.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	126.602,70
4.	PROVINSI RIAU	123.024,29
5.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	276.958,57
6.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	305.842,47
7.	PROVINSI SULAWESI UTARA	96.226,72
8.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	229.655,45
9.	PROVINSI MALUKU	68.741,12
10.	PROVINSI MALUKU UTARA	141.291,74
11.	PROVINSI PAPUA	569.446,51
12.	PROVINSI PAPUA BARAT	15.723,07
TOTAL		1.963.928,70

REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PU DAN PENATAAN RUANG PER KABUPATEN DI KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012

No	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	No	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	No	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN
1	KALIMANTAN BARAT		4.	ALOR	19.434,26	2.	Kep. TALAUD	9.335,63
	1. SAMBAS	13.349,59	5.	ROTE N'DAO	9.209,87	9	MALUKU UTARA	
	2. BENGKAYANG	15.195,19	5	NANGGROE ACEH DARUSSALAM			1. MOROTAI	9.080,77
	3. SANGGAU	11.961,54		1. KOTA SABANG	4.763,52	10	MALUKU	
	4. SINTANG	12.483,76	6	RIAU			1. MALUKU BARAT DAYA	9.656,68
	5. KAPUAS HULU	15.337,77		1. ROKAN HILIR	13.754,05		2. MALUKU TENGGARA BARAT	9.131,69
2	KALIMANTAN TIMUR			2. Indragiri Hilir	17.420,22		3. Kep. ARU	6.202,81
	1. NUNUKAN	9.899,74		3. Kep. Meranti	-	11	SUMATERA UTARA	
	2. MALINAU	13.414,30		4. BENGKALIS	10.337,65		1. SERDANG BEDAGAI	13.525,36
	3. KUTAI BARAT	24.256,63		5. KOTA DUMAI	-	12	PAPUA BARAT	
3	PAPUA		7	Kep. RIAU			1. RAJA AMPAT	14.113,11
	1. KOTA JAYAPURA	14.207,62		1. NATUNA	11.138,35	TOTAL		446.814,27
	2. KEEROM	10.676,62		2. Kep. ANAMBAS	8.212,09			
	3. PEGUNUNGAN BINTANG	17.521,16		3. KOTA BATAM	6.860,13			
4	NUSA TENGGARA TIMUR			4. KARIMUN	-			
	1. KAB. KUPANG	11.692,22		5. BINTAN	11.027,57			
	2. BELU	11.626,25	8	SULAWESI UTARA				
	3. Timor Tengah Utara	19.867,92		1. Kep. SANGIHE	14.363,39			

Sumber: Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, 'Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur', dalam Rapat Koordinasi di Balikpapan, 29 Mei 2012.